

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Tahun 2021  
Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kota Mungkid, Februari 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
Kabupaten Magelang**

**DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680511 199803 1 005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
a. Latar Belakang .....	1
b. Landasan Hukum .....	1
c. Maksud dan Tujuan .....	3
d. Aspek Strategis Organisasi .....	3
e. Permasalahan Utama Organisasi .....	11
f. Sistematika .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
a. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
b. Evaluasi Kinerja .....	23
BAB IV PENUTUP .....	35
a. Tinjauan Umum Keberhasilan .....	35
b. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja .....	36
c. Strategi Pemecahan Masalah.....	36
LAMPIRAN .....	38

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 dengan Visi RPJPD Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” disingkat “Gemilang”.

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019-2024 adalah: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH). Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Titik berat pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah menjalankan visi SEDAYA AMANAH dalam visi Bupati Magelang. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan

kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 3 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan misi Bupati Magelang yang ke 2, yaitu **“Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”**. Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

Guna mencapai tujuan dan urusan tersebut pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang telah melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan 8 program 17 kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 128.965.887.158.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan capaian kinerja terhadap 8 (delapan) program. Capaian Indikator Sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 adalah cakupan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercapai

sebesar 73,48% dari target akhir Renstra sebesar 93,42%, sehingga capaian indikator sasaran sampai tahun 2021 sebesar 73,48% dengan status evaluasi kinerja akan tercapai.

**a. Target Pendapatan**

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mengampu penerimaan pendapatan daerah dengan target sebesar Rp 1.097.500.000,- realisasi pendapatan daerah yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.364.243.860,- dengan capaian sebesar 124,3%. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Target dan Realisasi Pendapatan yang diampu DPUPR Tahun 2021

NO	Uraian	Target	Realisasi	Persentase %
<b>1</b>	<b>Restribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah :</b>	<b>397.475.580</b>	<b>550.970.060</b>	<b>138,62</b>
	a. Sewa tanah dan bangunan	36.075.580	184.420.460	511,21
	b. Sewa alat-alat berat	336.100.000	339.800.000	101,10
	c. Sewa alat – alat laboratorium	25.300.000	26.749.600	105,73
<b>2</b>	<b>Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :</b>	-	<b>26.311.800</b>	-
	a. Penjualan hasil penebangan pohon	-	13.951.000	-
	b. Penjualan aset lainnya	-	9.992.000	-
	c. Penjualan bahan – bahan bekas bangunan	-	2.368.800	-
<b>3</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu :</b>			
	a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	700.024.420	786.962.000	112,42
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.097.500.000</b>	<b>1.364.243.860</b>	<b>124,30</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat tahun 2021 capaian pendapatan sebesar Rp 1.364.243.860 (124,3%) dengan target Rp. 1.097.500.000,- dibandingkan capaian pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 1.541.956.720,- (102,80%) dengan target Rp. 1.500.000.000,-. Untuk capaian target pendapatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat peningkatan.

#### **b. Pelaksanaan APBD Tahun 2021**

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. **72.435.996.675** dengan realisasi sebesar Rp. **58.918.293.662** atau **(81,34%)** terdiri dari **7 program 41 kegiatan** dan silpa anggaran tahun 2020 sebesar **13.517.703.013,-** atau **(18,66%)**.

Untuk tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat anggaran untuk belanja langsung dan belanja pegawai sebesar Rp. **128.965.887.158** dengan realisasi sebesar Rp. **122.160.721.052** atau **(94,72%)** terdiri dari **8 program 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan** dan silpa anggaran tahun 2021 sebesar **6.805.166.106** atau **(5,28%)**

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2020 yang mencapai **81,34%**, maka realisasi anggaran pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar **13,38%**.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Letak Geografi
  - 3. Pembagian Wilayah Organisasi
  - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan utama Organisasi
- F. Sistematika

LKjIP Tahun 2021 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
  8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
  9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
  10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
  11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
  12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2021.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

### **D. Aspek Strategis Organisasi**

#### 1. Visi dan Misi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang tahun 2005 – 2025 dengan Visi RPJPD Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “**Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah**” disingkat “**SEDAYA AMANAH**”.

Dalam mewujudkan visi RPJMD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2019-2024 adalah: **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan**

**Amanah (SEDAYA AMANAH).** Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Titik berat pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah menjalankan visi SEDAYA AMANAH dalam visi Bupati Magelang. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

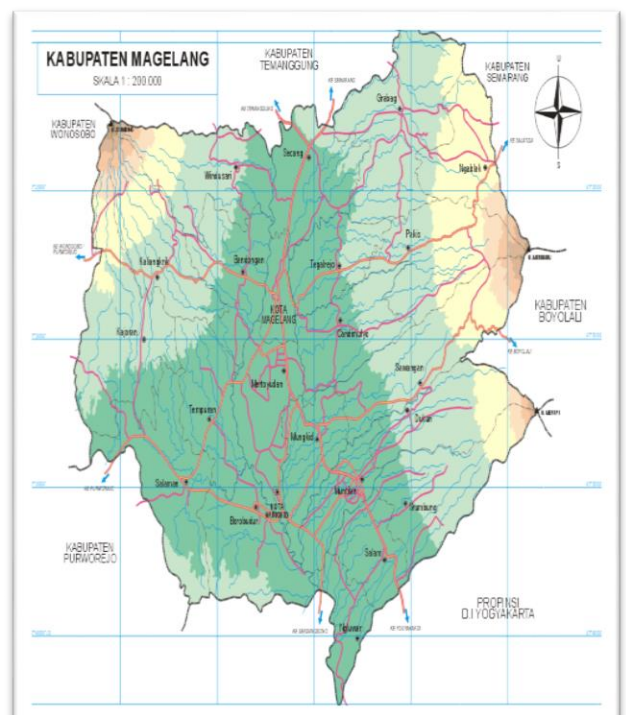
Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 3 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan misi Bupati Magelang yang ke 2, yaitu **“Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian**

**lingkungan hidup**". Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.

## 2. Letak Geografi

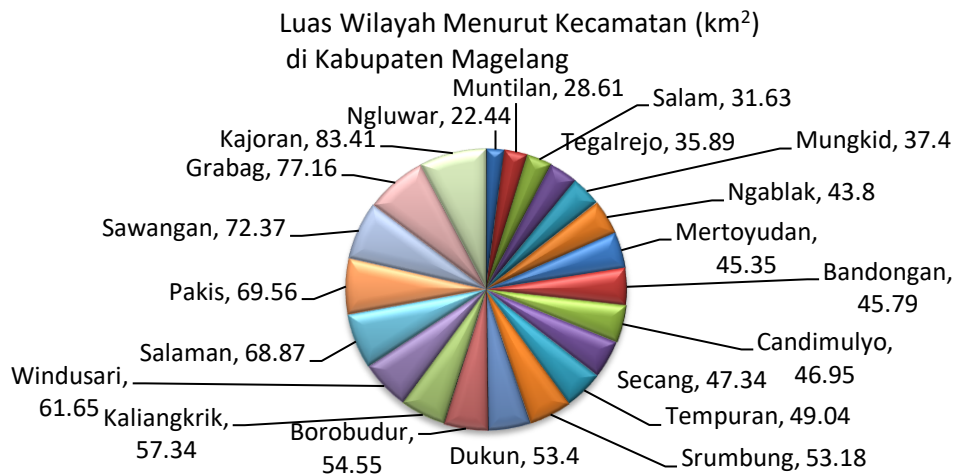
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 6, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara  $110^{\circ} - 01' - 51''$  Bujur Timur,  $110^{\circ} - 26' - 58''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} - 19' - 13''$  Lintang Selatan dan  $7^{\circ} - 42' - 16''$  Lintang Selatan.



Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

### 3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km<sup>2</sup> (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:



### 4. Organisasi Perangkat Daerah

#### a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Program;
  - 2) Subbagian Keuangan; dan
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Marga, membawahkan:
  - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;

- 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
  - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
4. Bidang Pengairan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi irigasi;
    - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
    - 3) Seksi Bina Manfaat.
  5. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
    - 1) Seksi Bangunan Gedung; dan
    - 2) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
  6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
    - 2) Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
    - 3) Seksi Pertanahan.
  7. UPT, membawahkan subbagian Tata Usaha; dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- (Struktur organisasi secara lengkap terlampir)

c. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja , tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- 1) Tugas Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Membantu Bupati Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
  - a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan serta kesekretariatan;
  - b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - c) Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
  - d) Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang dan pertanahan;

- e) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g) Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
- h) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2020 sebanyak 171 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Ka Subbag/ Kepala Seksi/ Kepala UPT/ Ka Subbag TU	23
5.	Fungsional Umum	142
Jumlah		171

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2021

Tabel 1.2 Jumlah PNS Menurut Tingkat Kependidikan  
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pasca Sarjana (S2)	11
2.	Sarjana (S1)	27
3.	Sarjana Muda (D3)	12
4.	SLTA	85
5.	SLTP	30
6.	SD	6
Jumlah		171

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2021

Tabel 1.3 Jumlah PNS Menurut Golongan  
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Golongan IV	8
2.	Golongan III	52
3.	Golongan II	103
4.	Golongan I	8
Jumlah		171

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2021

Tabel 1.4 Jumlah PNS Menurut Eselon  
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

<b>No</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	23
4.	Non Eselon	142
Jumlah		171

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2021



e. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana		Jumlah	Satuan
B	Peralatan dan Mesin			
	a	1) Ceketer 2) Loader / wheel loader 3) Mesin Gilas 4) Wacker 5) Pan Mixer 6) Spryer 7) Excavator Backhoe 8) Backhoe Loader 9) Vibro Roller 10)Trailer 11)Mesin Potong Rumput	0 1 20 3 3 5 1 1 1 1 31	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
	b	Alat Angkutan		
		- Kendaraan Dinas Roda Empat - Kendaraan Dinas Roda Enam - Kendaraan Dinas Roda Tiga - Kendaraan dinas roda dua	11 7 6 82	Unit Unit Unit Unit
	c	Alamat Kantor dan Rumah Tangga - Komputer - Laptop - Printer - Mesin Ketik - Meja - Kursi - Kursi Lipat - LCD Projector - Gps - Kamera	24 36 30 16 276 260 51 8 20 17	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
C	Bangunan dan Gedung			
	-	Bangunan Kantor	13	Unit

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang bulan Desember 2021

## **E. Permasalahan Utama Organisasi**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kapasitas pelayanan jalan dan kemantapan jalan sesuai masa layanan jalan, lebar jalan yang belum memenuhi standar masih banyak.
2. Banyaknya kondisi jaringan Irigasi yang Rusak/belum terbangun dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara saluran irigasi.
3. Belum terpenuhinya capaian dan layanan pengelolaan sanitasi layak dan pengembangan air minum layak (100%) ini dikarenakan pembangunan sanitasi dan air minum belum menjadi prioritas pembangunan daerah, perilaku hidup sehat dimasyarakat masih kurang dan kondisi sumber mata air dan debit saat ini berkurang kadang kala lahan untuk bangunan sipil dan jaringan sering menjadi konflik.
4. Masih perlunya gedung – gedung pemerintah direnovasi agar berfungsi lebih baik atau layak fungsi.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendirikan bangunan yang berorientasi Tata Ruang serta mengurangi resiko bencana alam.

## **F. Sistematika**

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

## B. Evaluasi Kinerja

Sub Bab ini menyajikan Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar di peroleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2021.

## BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi, Perjanjian Kinerja eselon II, III dan IV Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

PERENCANAAN KINERJA  
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

#### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**Perjanjian Kinerja (PK)** merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	<b>Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah</b>	56,55%	61,63%	67,74%	73,81%	80,68%	87,48%	94,38%	94,38%
1.1	<i>Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang</i>	57,83%	60,97%	66,51%	72%	78,75%	85,42%	92,27%	92,27%

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	Persen	94,37%	95,77%	97,18%	98,59%	100%	
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	Persen	77,71%	78,89%	80,08%	81,27%	82,47%	
3		Cakupan layanan jaringan irigasi	Persen	83,44%	85,25%	87,17%	88,88%	90,42%	
4		Cakupan layanan Sumber Daya Air	Persen	72,19%	74,20%	81,74%	83,74%	91,30%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Ket.
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	Persen	99,25%	99,52%	99,73%	99,93%	100%	
6		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	Persen	12,50%	25,00%	50,00%	75,00%	100%	
7		Cakupan layanan air minum **	Persen	88,79%	89,91%	91,03%	92,15%	93,27%	
8		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	Persen	87,70%	88,73%	89,76%	90,79%	91,82%	
9		Persentase terbangunnya Landmark	Persen	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100%	
10		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	Persen	82,00%	86,00%	90,00%	95,33%	100%	
11		Cakupan layanan Jasa konstruksi	Persen	51,33%	62,95%	73,90%	88,05%	100%	
12		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	Persen	39,49%	45,96%	52,57%	59,19%	65,80%	
13		Persentase kesesuaian tata ruang	Persen	42,39%	50,87%	59,34%	67,99%	76,64%	
14		Cakupan kinerja pertanahan	Persen	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100%	

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021  
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	95,77%	93,85%
2.		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	78,89%	78,09%
3.		Cakupan layanan jaringan irigasi	85,25%	85,64%
4.		Cakupan layanan Sumber Daya Air	74,20%	77,22%
5.		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	99,52%	99,25%
6.		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	25,00%	0,00%
7.		Cakupan layanan air minum **	89,91%	90,21%
8.		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	88,73%	90,36%
9.		Persentase terbangunnya <i>Landmark</i>	75,00%	58,33%
10.		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	86,00%	80,67%
11.		Cakupan layanan Jasa konstruksi	62,95%	82,20%
12.		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	45,96%	55,97%
13.		Persentase kesesuaian tata ruang	50,87%	84,46%
14.		Cakupan kinerja pertanahan	50,00%	52,08%

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja, untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.738.097.145
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.506.280.605
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.104.900.145
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.738.826.115
5	Program Penataan Bangunan Gedung	45.129.549.960
6	Program Penyelenggaraan Jalan	45.508.507.818
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	18.479.610
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	221.245.760
<b>Jumlah:</b>		<b>128.965.887.158</b>

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 8 Program dan terdiri dari 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. **128.965.887.158**, terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 114.668.514.938 dan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 14.297.372.220.

Dan secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 sebagai mana terlampir.

Kegiatan yang dilaksanakan di DPUPR Kabupaten Magelang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang, Bantuan Keuangan Gubernur dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.4. Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021  
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	95,77%	Program Penyelenggaraan Jalan	45.508.507.818	39,65%
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	78,89%			
3		Cakupan layanan jaringan irigasi	85,25%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.506.280.605	6,54%
4		Cakupan layanan Sumber Daya Air	74,20%			
5		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	99,52%	Program Penataan Bangunan Gedung	45.129.549.960	40,57%
6		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	25%			
7		Persentase terbangunnya <i>Landmark</i>	75%			
8		Cakupan layanan air minum **	89,91%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.104.900.145	7,06%
9		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	88,73%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.738.826.115	4,13%
10		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	86,00%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	18.479.610	0,02%
11		Cakupan layanan Jasa konstruksi	62,95%			
12		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	45,96%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	221.245.760	0,19%



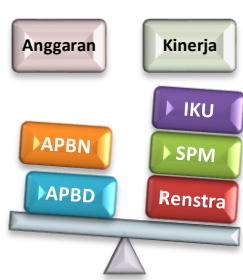
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>% Anggaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
13		Persentase kesesuaian tata ruang	50,87%			
14		Cakupan kinerja pertanahan	50%			
<b>Jumlah :</b>					<b>111.227.790.013</b>	

*Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis untuk mencapai target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKjIP) Dinas  
Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten  
Magelang merupakan  
perwujudan kewajiban Dinas

AKUNTABILITAS  
KINERJA  
A. Pengukuran Kinerja  
Organisasi.  
B. Realisasi Anggaran

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Kepala DPUPR Kabupaten Magelang untuk tahun 2021. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2021 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu: *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

Presentase Capaian Kinerja

$$(\text{Indikator Positif}) = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative, maka selanjutnya indikator negatif diberi (\*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

Presentase Capaian Kinerja

$$(\text{Indikator Negatif}) = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/ Warna Realisasi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan target kinerja hingga akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran kinerja per sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	% Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Cakupan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69,90	72	73,48	102,05%	92,27	79,63%	
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	93,39	95,77	93,85	98,00%	100	93,85%	
2		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	77,74	78,89	78,09	98,99%	82,47	94,69%	
3		Cakupan layanan jaringan irigasi	83,95	85,25	85,64	100,46%	90,42	94,71%	
4		Cakupan layanan Sumber Daya Air	66,70	74,20	77,22	104,07%	91,30	84,58%	
5		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	99,05	99,52	99,25	99,73%	100	99,25%	
6		Persentase terbangunnya Landmark	58	75	58,33	77,77%	100	58,33%	Tidak ada anggaran untuk pembangunan landmark
7		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	0	25	0	0,00%	100	0,00%	Sesuai UU Cipta Kerja, pelayanan PBG sampai saat ini perangkat dan regulasi belum ada
8		Cakupan layanan air minum **	89,03	89,91	90,21	100,33%	93,27	96,72%	
9		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	100	88,73	90,36	102,20%	91,82	98,76%	
10		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	92,67	86	80,67	93,80%	100	80,67%	Tidak ada pembelian alat
11		Cakupan layanan Jasa konstruksi	57,64	62,95	82,20	130,58%	100	82,20%	
12		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	50,65	45,96	55,97	121,78%	65,80	85,06%	

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	% Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13		Persentase kesesuaian tata ruang	69,50	50,87	84,46	166,03%	76,64	110,20%	
14		Cakupan kinerja pertanahan	40	50	52,08	104,16%	100	52,08%	
<b>Rata-rata:</b>						<b>99,85%</b>		<b>80,79%</b>	

Pada penetapan Kinerja tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis, memiliki 1 indikator kinerja utama, dan 14 indikator kinerja.

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.738.097.145	16.634.826.114	13,75%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.506.280.605	6.605.048.936	5,82%
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.104.900.145	8.091.466.855	6,28%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.738.826.115	4.737.231.164	3,67%
5	Program Penataan Bangunan Gedung	45.129.549.960	44.923.955.850	34,99%
6	Program Penyelenggaraan Jalan	45.508.507.818	41.003.683.275	35,29%
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	18.479.610	18.459.610	0,01%
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	221.245.760	146.049.248	0,17%
<b>Jumlah :</b>		<b>128.965.887.158</b>	<b>122.160.721.052</b>	<b>94,72%</b>

Sumber: SIMDA Kabupaten Magelang Tahun 2021

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung 8 program dan 17 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 128.965.887.158 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 122.160.721.052,- (94,72%) persentase

realisasi keuangan masuk dalam kategori **sangat tinggi**, tetapi masih terdapat 1 (satu) program dengan capaian kurang dari 75%, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan realisasi anggaran 66,01% kategori rendah, terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasi keuangannya sangat rendah yaitu Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru melaksanakan kegiatan ini pada saat anggaran perubahan setelah adanya disposisi Bapak Bupati mengingat tusi perencanaan tata ruang masih di Bappeda dan Litbangda dan adanya pembatasan pertemuan tatap muka.

## **B. Evaluasi Kinerja**

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2021 terhadap 1 (satu) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.

Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang 2019 - 2024. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun ke II dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2019 - 2024.

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar diperoleh gambaran capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

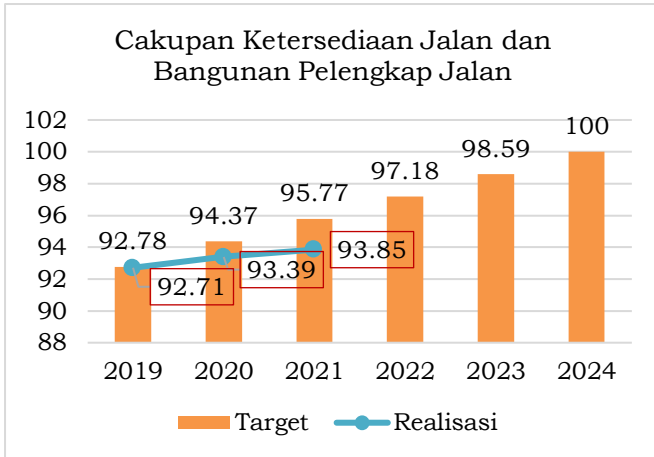
- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100% (seratus persen) atau lebih.
- d. Analisis berupa komitmen peningkatan kinerja Perangkat Daerah berupa inovasi atau strategi peningkatan kinerja atau adanya dukungan sumber dana lainnya dalam peningkatan kinerja.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran strategis yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan indikator kinerja, dimana pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut:

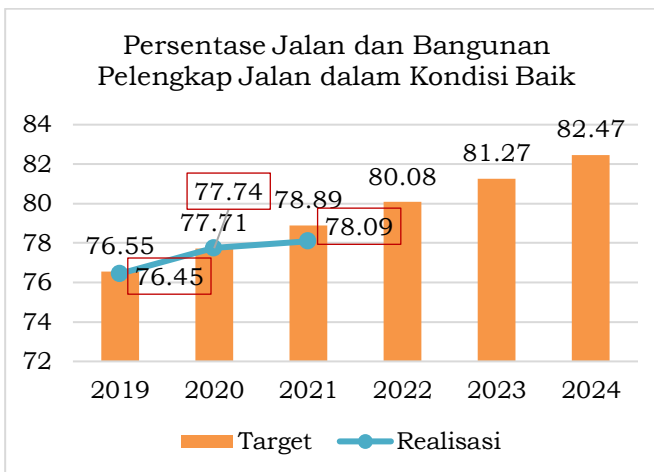
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Per Sasaran Sasaran Strategis  
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	93,39	95,77	93,85	98,00%	100	93,85%
2.	Umum dan Penataan Ruang	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	77,74	78,89	78,09	98,99%	82,47	94,69%
Rata-rata:						98,49%		94,27%



((Cakupan ketersediaan jalan) + (cakupan ketersediaan bangunan pelengkap jalan) + (cakupan jalan kondisi kabupaten sesuai standar))/3 **(komulatif)**.

$$((100 + 91,29 + 90,26)/ 3) = 93,85$$



((Cakupan jalan kondisi baik) + (cakupan bangunan pelengkap jalan kondisi baik))/2 **(komulatif)**.

$$((77,52 + 78,66)/ 2) = 78,09$$

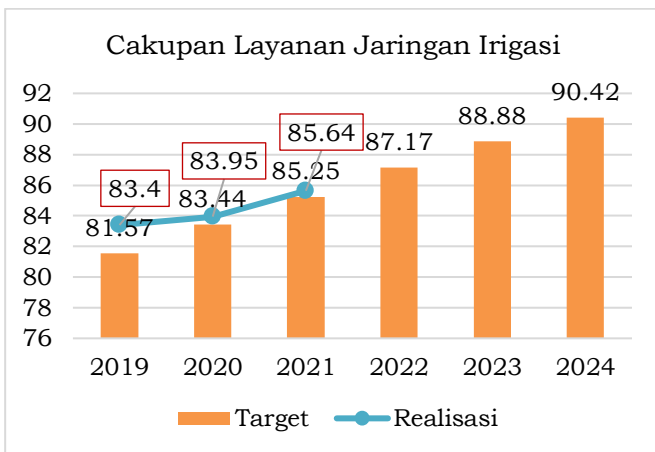
### Penunjang keberhasilan :

Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran 45.508.507.818, realisasi keuangan 41.003.683.275 atau (90,10%). Terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan, dengan capaian kinerja fisik 100%. 4 sub kegiatan dan 1 sub kegiatan 114,02% yaitu sub kegiatan Rekonstruksi Jalan. Target 10,70 km dengan realisasi 12,20 km.



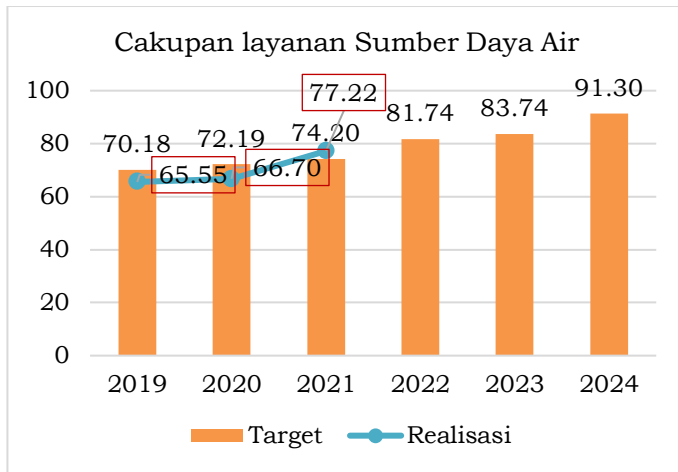
Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan  
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Cakupan layanan jaringan irigasi	83,95%	85,25	85,64	100,46	90,42	94,71%
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan Sumber Daya Air	66,70	74,20	77,22	104,07	91,30	84,58%
Rata-rata:						102,26%		89,65%



((Cakupan ketersediaan saluran irigasi) + (cakupan ketersediaan bangunan irigasi) + (cakupan saluran irigasi dan bangunan irigasi dalam kondisi baik) + (cakupan bangunan irigasi dalam kondisi baik)/4) **(komulatif)**.

$$((100 + 93,53 + 68,99 + 80,05)/ 4) = 85.64\%$$



((Cakupan ketersediaan sumber daya air) + (cakupan akses sawah irigasi) + (cakupan layanan pengelolaan air))/3 **(komulatif)**.

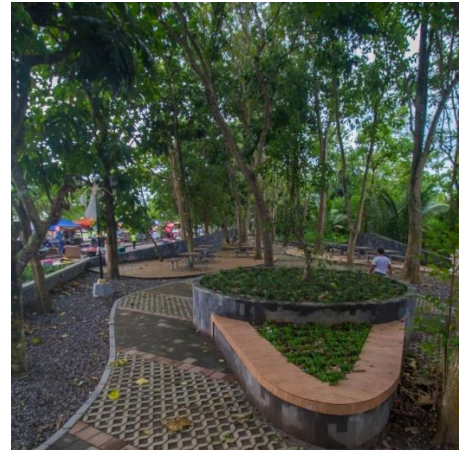
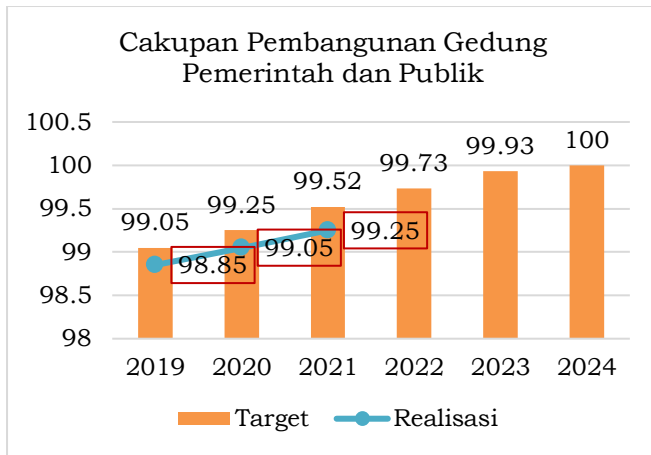
$$((66,67 + 82,12 + 82,86)/3) = 77,22\%$$

### Penunjang keberhasilan:

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran 7.506.280.605, realisasi keuangan 6.605.048.936 atau 87,99%. Terdiri dari 2 kegiatan, 6 sub kegiatan dengan capaian fisik 100%.

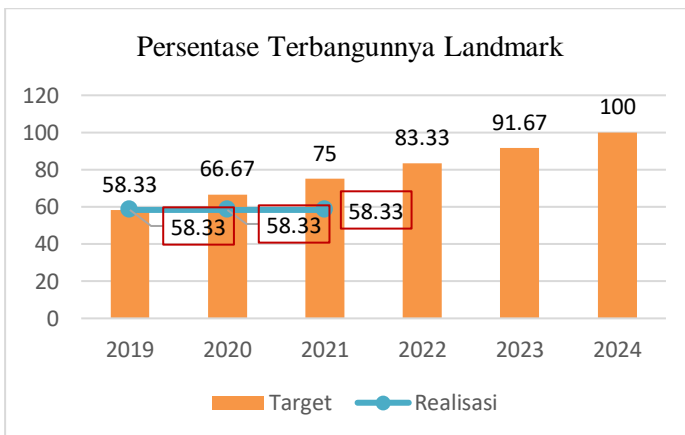
### Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
5.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	99,05	99,52	99,25	99,73	100	99,25
6.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase terbangun nya <i>Landmark</i>	58	75	58,33	77,77	100	58,33
7.		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	0	25	0	0	100	0
8.		Cakupan layanan air minum **	89,03	89,91	90,21	100,33	93,27	96,72%
9.		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	100	88,73	90,36	102,20	91,82	98,76%
Rata-rata:						60,45%		58,95%



((Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun/jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah) x 100%) **(komulatif)**.

$$((1.458 + 3) / 1.472) \times 100\% = 99,25$$



(Jumlah *landmark* yang dibangun/ rencana jumlah pembangunan *landmark*) x 100% **(komulatif)**.

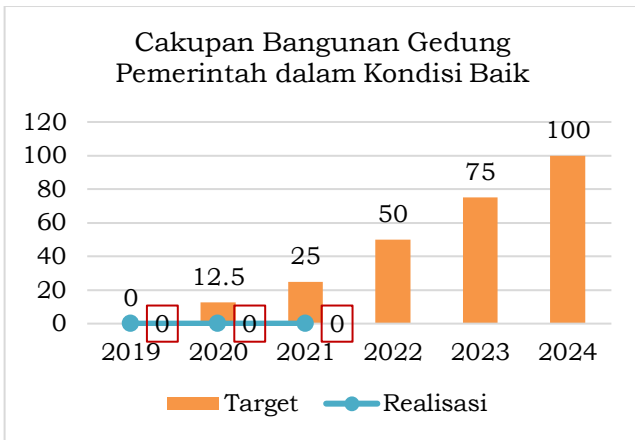
$$(7/12) \times 100\% = 58,33$$

**Permasalahan:**

Anggaran pembangunan *landmark* tidak tersedia.

**Solusi:**

Diajukan lagi pada tahun 2022 untuk pembangunan *landmark*.



(Jumlah bangunan gedung ber SLF / rencana jumlah bangunan ber SLF) x 100% **(komulatif)**.

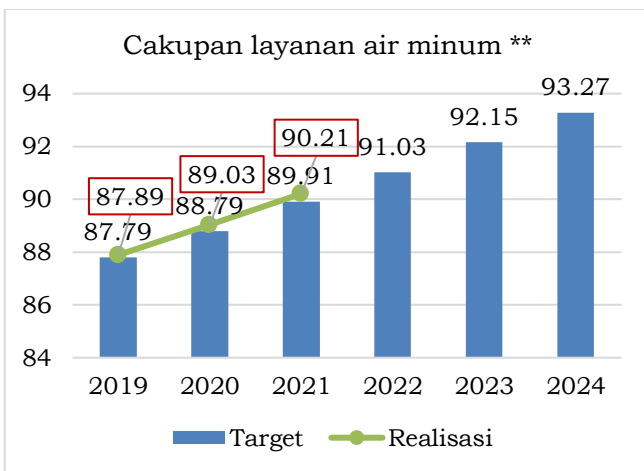
$$(0/0) \times 100\% = 0$$

**Permasalahan:**

Regulasi yang mengatur PBG sampai saat ini belum siap, baru sampai pembahasan dengan Dewan.

**Solusi:**

Pengajuan SK TPA dan TPT ke Bupati.

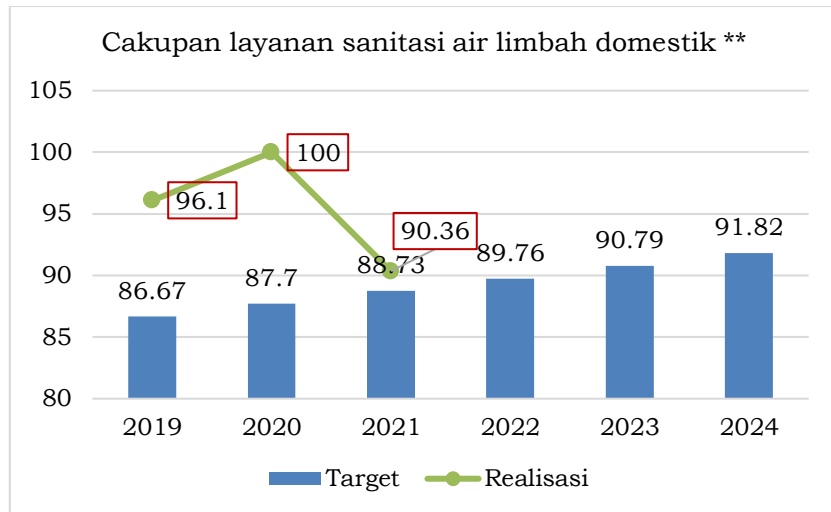


((Jumlah penduduk yang terlayani air minum/ jumlah total penduduk)\*100%) **(komulatif)**.

$$(397.955 / 441.157) \times 100\% = 90,21\%$$

**Penunjang keberhasilan:**

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp 8.104.900.145, realisasi 8.091.466.855 (99,83%) terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan capaian fisik 100,33%.



(Jumlah penduduk yang terlayani air limbah domestik/jumlah seluruh penduduk)\*100%) **(komulatif)**.

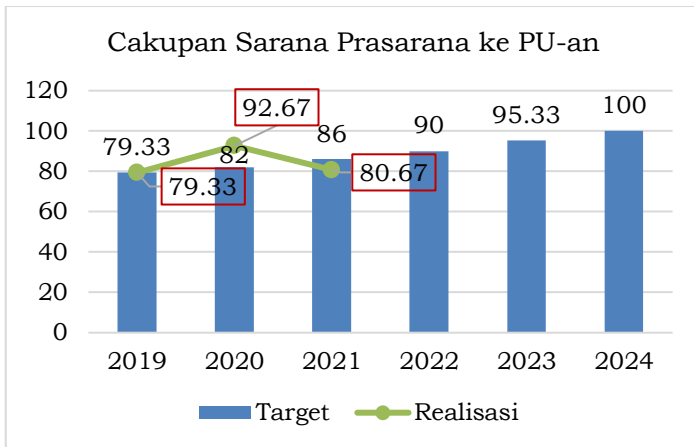
$$(398.627 / 441.157) \times 100\% = 90,36\%$$

**Penunjang keberhasilan :**

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran 4.738.826.115, realisasi 4.737.231.164 (99,97%) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan capaian fisik 102,20%.

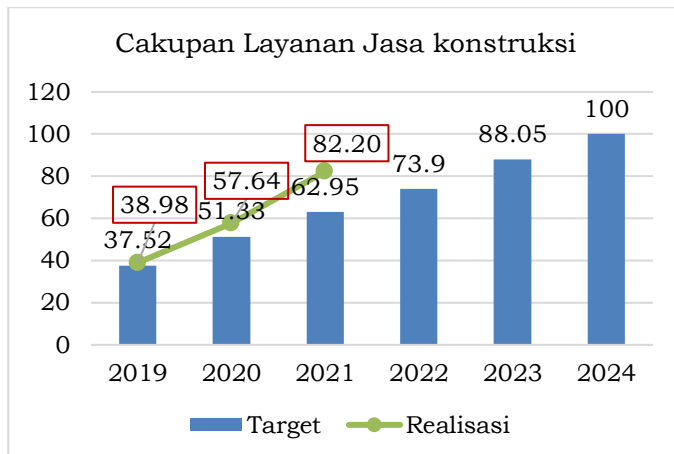
Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
10.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Cakupan sarana prasarana ke PU-an	92,67	86	80,67	130,58%	100	82,20%
11.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan Jasa konstruksi	57,64	62,95	82,20	121,78%	100	85,06%
Rata-rata:						112,19%		81,44%



(Cakupan ketersediaan sarana prasarana ke PU-an + cakupan sarana prasarana ke PU-an dalam kondisi baik)/2 **(komulatif)**.

$$((85,33 + 76,00) / 2) = 80,67$$



((Jumlah layanan jasa konstruksi yang sesuai SOP/jumlah ajuan layanan jasa konstruksi) x 100%) **(komulatif)**.

$$((868 + 370) / 1.506) \times 100\% = 82,20$$

#### **Penunjang keberhasilan :**

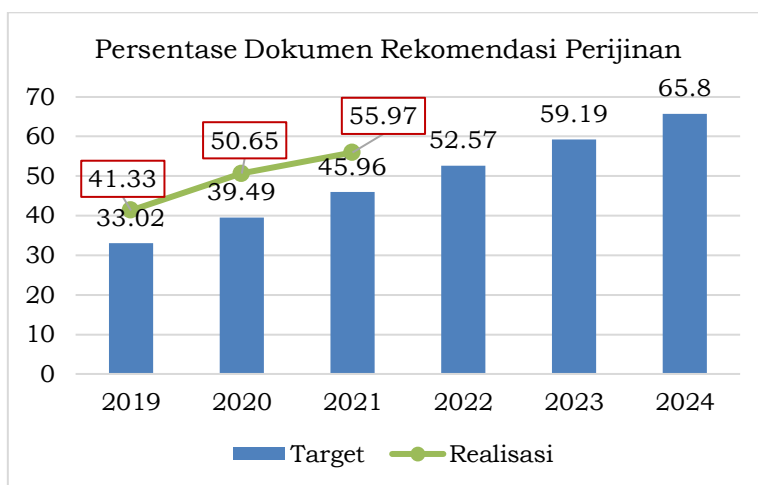
Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan pagu 18.479.610 realisasi keuangan 18.459.610 atau 99.89%, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan realisasi fisik 100%.

#### **Penunjang :**

Adanya kerjasama antara UPT Jasa dan Peralatan Konstruksi dengan UPT Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah dilapangan untuk survei harga bahan – bahan bangunan.

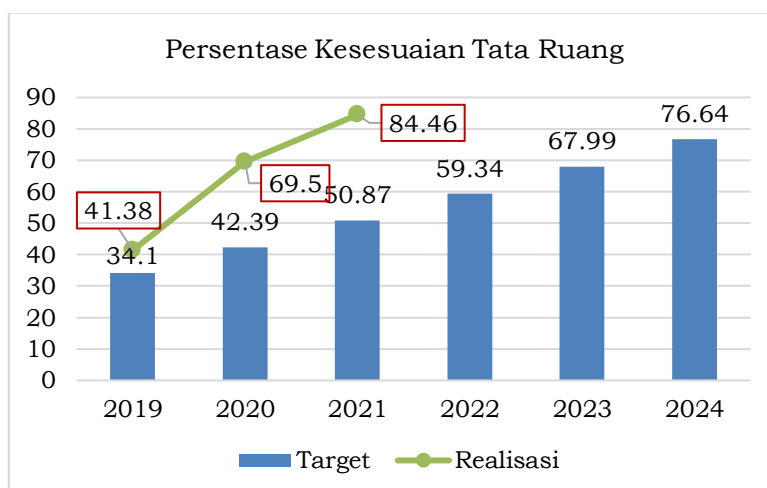
Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan  
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
12.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	50,65	45,96	55,97	121,78%	65,80	85,06%
13.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang	69,50	50,87	84,46	166,03%	76,64	110,20%
14.		Cakupan kinerja pertanahan	40	50	52,08	104,16%	100	52,08%
Rata-rata:						130,66%		82,45%



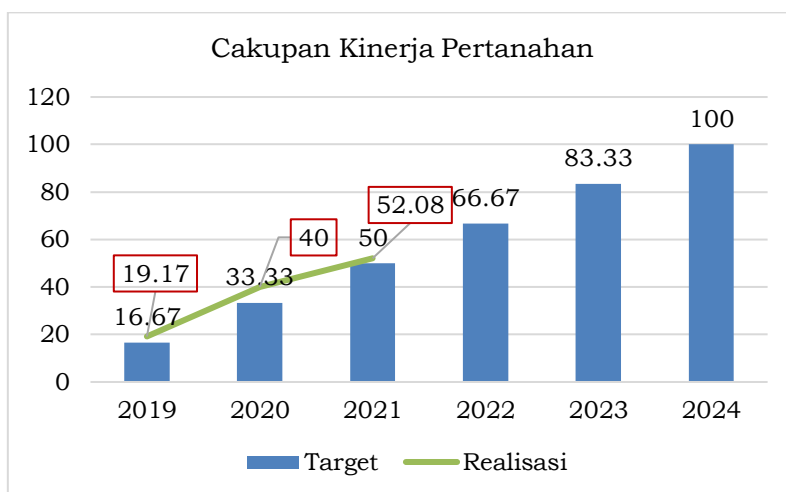
(Jumlah dokumen rekomendasi perijinan yang sesuai/Jumlah permohonan rekomendasi perijinan) x 100% **(komulatif)**.

$$((1.761 + 185) / 3.477) \times 100\% = 55,97\%$$



(Jumlah dokumen kesesuaian tata ruang/jumlah permohonan dokumen kesesuaian tata ruang)\*100% **(komulatif)**.

$$((1.928 + 415) / 2.774) \times 100\% = 84,46\%$$



(Jumlah bidang tanah yang dilakukan penatagunaan tanah/ jumlah kebutuhan bidang yang dilakukan penatagunaan tanah)\*100% **(komulatif)**.

$$[(96 + 29) / 240] \times 100\% = 52,08\%$$

### Penunjang keberhasilan:

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan pagu 221.245.760, realisasi keuangan 146.049.248 atau 66,01%, terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan capaian fisik 100%. Untuk Kegiatan pengadaan aset lainnya (tanah) dengan pagu anggaran 1.626.462.500, realisasi keuangan 1.282.719.408 (78,87) terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian fisik 131,82%.

Tabel 3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan	100%	96,29%	3,71%
		peningkatan jalan dan bangunan	100%	97,36%	2,64%
		pelengkap jalan	114,02%	78,85%	35,17%
		Persentase jalan dan bangunan	100%	96,21%	3,79%
		pelengkap jalan dalam kondisi baik	100%	94,67%	5,33%
2		Cakupan layanan	100%	95,34%	4,66%
		jaringan irigasi	100%	99,45%	0,55%
			100%	79,41%	20,59%
		Cakupan layanan	100%	99,19%	0,81%
		Sumber Daya Air	100%	91,46%	8,54%
			100%	45,85%	54,15%



<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>% Capaian Indikator Kinerja yang <math>\geq</math> 100%</b>	<b>% Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
3		Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik			
		Persentase terbangunnya Landmark			
		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	100%	99,91%	0,09%
		Cakupan layanan air minum **	100%	99,83%	0,17%
		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	101,84%	99,97%	0,03%
4		Cakupan sarana prasarana ke PU-an	100%	96,55%	3,45%
		Cakupan layanan Jasa konstruksi	100%	99,89%	0,11%
5		Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	100%	45,95%	53,05%
		Persentase kesesuaian tata ruang	100%	70,62%	29,38%
		Cakupan kinerja pertanahan	131,82%	91,47%	8,53%
				78,87%	52,95%
Rata-rata tingkat efisiensi:					57,54%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan, dan penataan ruang dan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- 1) Tercapainya indikator cakupan layanan jaringan irigasi dari target 85,25% tercapai 85,64%.
- 2) Tercapainya layanan Sumber Daya Air dari target 74,20% tercapai 77,22%.
- 3) Tercapainya cakupan layanan air minum (SPM) dari target 89,1% tercapai 90,21%.
- 4) Tercapainya cakupan layanan sanitasi air limbah domestik (SPM) dari target 88,73% tercapai 90,36%.
- 5) Tercapainya cakupan layanan jasa konstruksi dari target 62,95% tercapai 82,20%.
- 6) Persentase dokumen rekomendasi perijinan dari target 45,96% tercapai 55,97%.
- 7) Persentase kesesuaian tata ruang dari target 50,87% tercapai 84,46%.
- 8) Cakupan kinerja pertanahan dari target 50,00% tercapai 52,08%.

**B. Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :**

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan pada tahun 2022, anggaran yang tersedia mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja. Untuk program tersebut target kinerja tidak terpenuhi/ tercapai.
- 2) Target kinerja untuk cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik tidak tercapai karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- 3) Program Penataan Bangunan Gedung pada sub kegiatan penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG. Capaian target tidak tercapai karena kendala adanya PP No. 16 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa IMB berubah menjadi PBG sehingga ketentuan dan persyaratan pengurusan PBG dan SLF berubah serta peraturan di daerah juga belum siap. Upaya yang dilakukan Raperda Retribusi PBG sudah sampai proses pembahasan dengan Dewan. SK TPA dan TPT sudah diajukan dan menunggu tanda tangan Bupati. Berkas permohonan PBG dan SLF yang masuk sudah diverifikasi, yaitu sebanyak 194 permohonan masuk.
- 4) Pada tahun 2021 tidak ada anggaran pembangunan *landmark*. Upaya yang dilakukan yaitu mengajukan lagi anggaran pembangunan *landmark* pada tahun 2022.
- 5) Cakupan sarana prasarana ke PU-an tidak tercapai karena anggaran untuk pengadaan alat berat dan alat-alat laboratorium tidak tersedia. Upaya yang dilakukan yaitu mengajukan anggaran lagi di tahun 2022.

**C. Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

Karena permasalahannya adalah ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi maka upaya yang dilakukan adalah mengajukan lagi di tahun 2022.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2021 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kota Mungkid,      Februari 2022  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
Kabupaten Magelang**

**DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19680511 199803 1 005**